

Kaji IKP, Balitbangda sebut Variabel Lingkungan Fisik dan Politik Tertinggi

written by Admin | November 15, 2022



Kutai Kartanegara, *biwara.co* – Seminar Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Kutai Kartanegara (Kukar) Tahun 2022, digelar oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) kabupaten Kukar yang bekerjasama dengan CV. Cyprus, di ruang rapat Balitbangda Kukar, Tenggarong, pada Selasa (15/11/2022).

Kepala Bidang Sosial Budaya Kemasyarakatan Balitbangda Kukar Tulus Sutopo, mengatakan penelitian indeks kemerdekaan pers merupakan bagian penting dalam memberikan informasi pembangunan daerah melalui media industri baik cetak, online serta kritik dan masukan berjalan baik.

“Kajian kemerdekaan pers dilakukan dalam mempertahankan pilar-pilar demokrasi dan kemerdekaan pers itu sudah diatur dalam kode etik pers,” katanya.

Ditempat yang sama, pemateri Karno memaparkan hasil riset indeks kemerdekaan pers yang dilakukan timnya dengan rumusan masalah bagaimana indeks kemerdekaan pers di Kukar.

“Tujuannya sendiri untuk menyusun indeks kemerdekaan pers tahun 2022 yang merupakan gambaran kondisi kemerdekaan pers Kukar sepanjang tahun sebelumnya yaitu Januari hingga Desember 2021,” ujarnya.

Adapun metode penelitian yang digunakan, sebutnya, yakni mix methode (kuantitatif-kualitatif), kemudian kuantitatif berdasarkan pendekatan surveil dan kualitatif wawancara mendalam dan FGD.

“Penilaian IKP dilakukan pada tiga kondisi lingkungan yaitu, lingkungan fisik dan politik terdiri dari sembilan indikator, kemudian lingkungan ekonomi yang terdiri dari lima indikator dan lingkungan hukum terdiri dari enam indikator,” jelasnya.

Sedangkan dari responden dan informan kunci, kata Karno, terdapat lima orang dari pimpinan perusahaan pers (cetak, siaram dan siber). sepuluh orang dari unsur pemerintahan (Pemerintah daerah, DPRD dan penegak hukum) dan lima orang dari unsur masyarakat (lembaga swadaya masyarakat, terkait pers, akademisi, komisi informasi publik/KIP atau komisi penyiaran Indonesia/KPI).

“Dari ketiga variabel yakni variabel lingkungan meraih bobot paling tinggi yakni 50,21 persen menyangkut lingkungan fisik dan politik, kemudian lingkungan ekonomi diangka 23,59 persen dan lingkungan hukum meraih bobot 26,21 persen,” pungkasnya.
(Cyn/Adv/KominfoKukar)